

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BARRU

MUH. ISYAH



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BARRU

Sebagai Salah satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana konomi

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH. ISYAH



Kepada

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BARRU

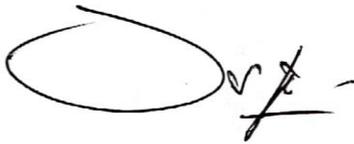
disusun dan diajukan oleh

MUH. ISYAH
A111 14 025

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 25 Januari 2019

Pembimbing I



Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si
NIP. 19691215 199903 1 002

Pembimbing II



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si
NIP. 19770913 200212 2 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003

iii



SKRIPSI

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BARRU

disusun dan diajukan oleh

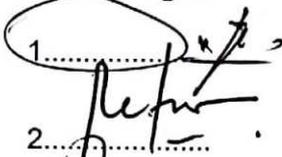
MUH. ISYAH

A111 14 025

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 25 Januari 2019 dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Nursini, SE., MA.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.	Anggota	4..... 
5.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si.	Anggota	5..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.
NIP.19690413 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : MUH. ISYAH
NIM : A11114025
jurusan/program studi : ILMU EKONOMI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian skripsi yang berjudul

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BARRU

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah usulan penelitian skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah usulan penelitian skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,



MUH. ISYAH



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul "*Pengaruh Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Barru*" dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tuaku, Arsyad dan Ratna. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik yang senantiasa mendukung setiap langkah dan keputusan yang penulis ambil. Terima kasih untuk segala doa dan kasih sayang yang tucurahkan untuk penulis sehingga dapat sampai sejauh ini. Serta kepada saudara kandung penulis Abd. Wahab dan Muh. Ishak.

Serta tidak lupa pula peneliti ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si. selaku pembimbing I dan ibu Dr. Retno Fitrianti, SE.,M.Si. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tulus, dan ikhlasmeluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof .Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

Bapak Prof. Dr. Rahman Kadir, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis.



3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, serta ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si. terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Dr. Nursini, SE., MA., bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., dan bapak Dr. Hamrullah, SE, M.Si. selaku dosen penguji yang memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
5. Bapak Drs. Taslim Arifin, MA dan Bapak Prof. Muhammad Amri, SE., MA., Ph.D. selaku penasehat akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin khususnya Departemen Ilmu Ekonomi atas perhatian, ilmu pengetahuan, dan bantuan yang telah diberikan selama perkuliahan.
7. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
8. Sahabat-sahabat AP2 ommunity, terima kasih atas dukungan, hiburan, serta kebersamaannya selama ini.
9. Sahabat-sahabat *Besiders 14*. Amir, Andry, Arif, Bima, Imam, Sandi, dan Rey. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya.
10. Anggota group unfaedah KEMIRI yang paling gila, Adhany (Ketua geng), Gusti, dan Nabila.
11. Teman-teman CSE. Arif, Asma, Asty, Anti Belopa, Anti Maros, Diky, imam, Indah, Irna, Kurni, Liska, Relita, Reski, Rika, Rurah, Suci, Sukma, dan Umi. Terima kasih atas arahan, bantuan, bimbingan, dan kebersamaannya selama menyusun skripsi.



12. Teman-teman seangkatan Ilmu Ekonomi 2014 (PRIMES), terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman bersama kalian.
13. Teman-teman pengurus Keluarga Mahasiswa Masjid Darul 'Ilmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
14. Teman-teman KKN Tematik BangunMandar gelombang 96 desa Tadui, Alul, Amir, Andini, Ayu, Bayu, Bima, Fajri, Gede, Irma, Ika, Kak Jabal, Surya, Syifa, Tiara, Yaser, Yaya, dan Vira, serta seluruh masyarakat desa Tadui khususnya dusun Salutalawar yang telah memberikan cerita dan pengalaman bagi peneliti.
15. Semua pihak yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Akhir kata, tiada kata yang patut peneliti ucapkan selain doa semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dan senantiasa melimpahkan berkahnya atas amalan kita, serta menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga-Nya yang tertinggi. Aamiin ya robbal'alam.

Makassar, 17 Februari 2019

Muh. Isyah



ABSTRAK

PRNGARUH BELANJA PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BARRU

Muh. Isyah
Sultan Suhab
Retno Fitrianti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap tingkat pengangguran secara tidak langsung melalui IPM, serta pengaruh belanja infrastruktur terhadap tingkat pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur menggunakan program IBM SPSS Amos versi 22 untuk melihat hubungan langsung dan tidak langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui IPM. Belanja kesehatan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui IPM. Belanja infrastruktur tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat pengangguran dan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran

This study aims to determine the effect of education spending and health spending on the unemployment rate indirectly through HDI, and the effect of infrastructure spending on the unemployment rate either directly and indirectly through economic growth in barru district. The analytical method used in this research is path analysis using the IBM SPSS Amos version 22 program to see the direct and indirect connection.

The results of this study indicate that education spending has an indirect positive effect on the unemployment rate through HDI. Health spending has a negative effect on the unemployment rate through HDI. Infrastructure spending does not directly affect on the unemployment rate and has a negative indirect effect on the unemployment rate through economic growth.

Keywords: Education Spending, Health Spending, Infrastructure Spending, HDI, Economic Growth, Unemployment Rate



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Prakata	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Grafik.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teoretis	9
2.1.1 Pengangguran	9
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	15
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.1.4 Belanja Pendidikan.....	18
2.1.5 Belanja Kesehatan	19
2.1.6 Belanja Infrastruktur	19
2.2 Hubungan Antar Variabel	19
2.2.1 Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Pengangguran.....	19
2.2.2 Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Pengangguran	22
2.2.3 Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran.....	23
3 Penelitian Terdahulu	24



2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian	29
2.5 Hipotesis	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2 Jenis Penelitian Dan Sumber data	31
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.4 Metode Analisis Data	31
3.5 Uji Kesesuaian (<i>Goodnes of Fit</i>)	33
3.6 Definisi Operasional	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Demografi dan Indikator Makroekonomi daerah ..	36
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian.....	38
4.3 Analisis Hasil	43
4.4 Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
DAFTAR LAMPIRAN	59



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Kabupaten Barru Tahun 2012-2016	4
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2012-2016.....	5
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Pengangguran, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2012-2016.....	6
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Kepadatan Penduduk dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barru Tahun 2017	36
Tabel 4.2 <i>Assesment of Normality</i>	43
Tabel 4.3 Pengaruh Variabel Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Barru 2003-2017 (<i>Standardized Coefficient</i>)	45
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	29
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, 2014-2017	37
Gambar 4.2 <i>Path Diagram</i>	46



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
Grafik 4.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Barru Tahun 2003-2017	38
Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2003-2017	40
Grafik 4.3 Perkembangan IPM Kabupaten Barru Tahun 2003-2017	41
Grafik 4.4 Perkembangan Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Kabupaten Barru Tahun 2003-2017	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih dalam tahap pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai suatu kesejahteraan dibutuhkan kesempatan kerja yang memadai dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Di Indonesia, antara kesempatan kerja yang ada dengan angkatan kerja terjadi kesenjangan yaitu peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang peningkatannya lebih cepat, hal ini akan berdampak terciptanya pengangguran. Pengangguran yang terjadi akan berdampak pada kehidupan sosial yaitu tingkat kriminal dan kekerasan, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan akan menurun.

Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia harus bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi berdasarkan kenyataan yang ada jumlah pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah angkatan tenaga kerja



yang ada. Akibat dari banyaknya penawaran tenaga kerja, akan banyak terjadi pengangguran karena jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak dimanfaatkan.

Menurut Todaro (1997) pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat keberhasilannya dari beberapa indikator perekonomian, satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan

h tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno,



Selama ini, berbagai kebijakan dibuat disetiap pemerintahan untuk menanggulangi masalah pengangguran, kebijakan yang didesain secara sentralistik oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dimentori oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), merancang berbagai program untuk dapat mengatasi masalah pengangguran. Program tersebut diantaranya, memberikan pendidikan gratis untuk meningkatkan taraf pendidikan, pelatihan tenaga kerja disetiap daerah, *job fair*, serta bimbingan dan bantuan untuk berwirausaha.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dalam pelaksanaan RPJM Nasional, dikenal adanya strategi pokok pembangunan yang salah satunya memuat mengenai strategi pembangunan Indonesia. Sasaran pokok dari strategi pembangunan Indonesia adalah untuk pemenuhan hak dasar rakyat serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh. Hak-hak dasar rakyat yang dimaksud adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Hak-hak dasar tersebut selama ini telah terabaikan dan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan padahal hak-hak dasar tersebut secara jelas diamanatkan oleh konstitusi. Tanpa permasalahan hak dasar akan sulit diharapkan partisipasi pada kebebasan dan persamaan.

Untuk itu diperlukan adanya agenda dalam melaksanakan rencana program pembangunan tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

kat. Sasaran yang ingin dicapai dari adanya program ini antara lain;
an lapangan kerja yang memadai untuk mengurangi pengangguran,



mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta perbaikan infrastruktur penunjang.

Setiap daerah di Indonesia mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai proses pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Dana ini dapat dibelanjakan oleh pemerintah pusat dalam hal infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dan sebagainya untuk mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan meningkatkan pembangunan fasilitas umum yang dapat menarik para investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan, serta memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan agar angkatan kerja yang ada di daerah memiliki keterampilan serta pengetahuan yang mumpuni untuk memasuki dunia kerja dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut data belanja daerah di Kabupaten Barru

Tabel 1.1
Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Kabupaten Barru
Tahun 2012-2016

Tahun	Belanja Pendidikan (Rupiah)	Belanja Kesehatan (Rupiah)	Belanja Infrastruktur (Rupiah)
2012	233.105.000.000	59.224.000.000	38.333.000.000
2013	272.863.000.000	62.501.000.000	61.729.000.000
2014	323.673.334.718	71.262.658.893	84.481.988.707
2015	341.503.442.838	89.226.437.080,83	120.552.382.843
2016	299.906.007.718	145.667.177.175	178.930.734.355

Direktorat jendral Perimbangan Keuangan 2017



Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa belanja kesehatan dan belanja infrastruktur di Kabupaten Barru terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016. Kemudian belanja pendidikan terus meningkat dari tahun 2012-2015, namun mengalami penurunan pada tahun 2016. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barru. Berikut adalah data Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2012-2016

Tahun	IPM (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2012	71,70	7,77
2013	72,16	7,81
2014	67,94	7,36
2015	68,64	6,32
2016	69,07	6,10

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka 2017

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten barru mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan menurun pada tahun 2014 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami penurunan dari tahun 2013-2016. Dengan peningkatan belanja infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, yang terjadi di Kabupaten barru belanja infrastruktur terus meningkat sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.



Di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Kabupaten Barru, masalah tingkat pengangguran juga merupakan isu penting yang menjadi permasalahan tahunan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Barru. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat juga harus mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah pengangguran yang ada dengan memanfaatkan dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran Kabupaten Barru setiap tahunnya cukup besar. Berikut tabel jumlah penduduk dan pengangguran di Kabupaten Barru

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Pengangguran, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Pengangguran (Jiwa)	TPT (Persen)
2012	168.034	67.192	3.209	4,78
2013	169.302	62.526	2.819	4,51
2014	170.316	61.376	1.393	2,27
2015	171.217	64.767	4.977	7,71
2016	171.906	64.767	4.760	7,35

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka 2017 & 2014

Tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa jumlah pengangguran mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar 3.584 jiwa sedangkan penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 hanya sebanyak 217 orang. Jika masalah pengangguran yang demikian pelik dibiarkan berlarut-

akan sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial.

Jadi tidak saja menimpa para pencari kerja yang baru lulus sekolah,



melainkan juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan karena kantor dan pabriknya tutup. Indikator masalah sosial bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Dan Belanja Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Barru”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran secara tidak langsung melalui IPM?
2. Apakah belanja infrastruktur berpengaruh terhadap tingkat pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh belanja pendidikan dan belanja kesehatan terhadap tingkat pengangguran secara tidak langsung melalui IPM.
2. Mengetahui pengaruh belanja infrastruktur terhadap tingkat pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBD.



2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap upaya penurunan tingkat pengangguran.
3. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, ekonomi dan sosial sehingga mengganggu proses pembangunan.



Menurut Marhaeni dan Manuati dalam Putu (2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu: (1) Tingkat upah; dimana tingkat upah memegang peranan penting atau sangat berpengaruh besar dalam kondisi ketenagakerjaan; (2) Teknologi; penggunaan teknologi yang tepat guna akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan jumlah pengangguran; (3) Fasilitas modal; fasilitas modal mempengaruhi permintaan tenaga kerja melalui dua sisi. Pengaruh substitutif, dimana bertambahnya modal akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Pengaruh komplementer, dimana bertambahnya modal akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengelola modal yang tersedia; (4) Struktur perekonomian; perubahan struktur ekonomi menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja.

Menurut penyebabnya, pengangguran digolongkan dalam empat jenis yaitu

a. Pengangguran normal atau friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.

b. Pengangguran siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang.

Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya.

di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini



menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

c. Pengangguran struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural.

d. Pengangguran teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh

aan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran



Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut

a. Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan inidi dalam suaatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan.

b. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini terutamaa wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai.

c. Pengangguran bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat disektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.



d. Setengah menganggur

Di negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris *underemployed*. Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

Di Amerika Serikat, seseorang digolongkan sebagai penganggur apabila (i) sedang mencari pekerjaan tetapi selama 4 minggu (sebulan) sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan, (ii) masih belum bekerja tetapi akan memulai kerja dalam masa 4 minggu, dan (iii) untuk sementara diberhentikan kerja tetapi akan digunakan lagi oleh majikannya dalam waktu 4 minggu ke depan.

Seterusnya, untuk menentukan tingkat (persentase) pengangguran yang terdapat dalam perekonomian, perlu pula ditentukan jumlah angkatan kerja pada bulan tersebut. Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15 hingga 64 tahun, kecuali: (i) ibu rumah tangga yang lebih suka menjaga keluarganya daripada bekerja, (ii) penduduk muda dalam lingkungan umur tersebut yang masih meneruskan pelajarannya di sekolah dan universitas, (iii) orang yang belum mencapai umur 65 tetapi sudah pensiun dan tidak mau bekerja lagi, dan (iv) pengangguran sukarela yaitu

penduduk dalam lingkungan umur tersebut yang tidak secara aktif



mencari pekerjaan. Dengan demikian jumlah angkataan kerja dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut

$$L = PL - (IR + MP + PP + PS) \quad (1)$$

di mana L adalah jumlah tenaga kerja (angkatan kerja), PL adalah penduduk dalam lingkungan umur 15 – 64 tahun, IR adalah ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja, MP adalah mahasiswa dan pelajar, PP adalah pekerja yang telah pensiun dan tidak ingin bekerja lagi, dan PS adalah orang-orang tidak sekolah dan tidak bekerja dan juga tidak mencari pekerjaan.

Penduduk dalam lingkungan umur 15 – 64 tahun, yaitu PL dapat dipandang sebagai tenaga kerja potensial. Mereka sudah dapat digolongkan sebagai tenaga kerja apabila mereka benar-benar memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Tetapi sebagai dari mereka, berdasarkan kepeada pilihan mereka sendiri, memutuskan untuk tidak mencari kerja. Oleh sebab itu jumlah tenaga kerja yang sebenarnya terdapat dalam perekonomian (L), yang digolongkan sebagai angkatan kerja atau *labour force*, adalah jumlah tenaga kerja yang dihitung dengan menggunakan persamaan (1). Perbandingan di antara angkatan kerja yang sebenarnya dengan penduduk dalam lingkungan umur 15 – 64 tahun dinamakan tingkat penyertaan tenaga kerja (*labour participation rate*). Tingkatnya (dinyatakan dalam persen) dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut

$$\text{Tingkat penyertaan (\%)} = \frac{L}{PL} \times 100 \quad (2)$$

Setelah sebuah negara mendapatkan informasi mengenai dua data yang diterangkandi atas, yaitu jumlah pengangguran dan jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut

$$\text{Tingkat pengangguran (\%)} = \frac{U}{L} \times 100 \quad (3)$$



Dimana U adalah jumlah pengangguran dan L adalah jumlah tenaga kerja (angkatan kerja).

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP (Fatmasari, 2014).

IPM adalah sebagai salah satu tolak ukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Muliza dkk, 2017).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir;

pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan



pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu: (1) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi); (2) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); (3) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut



$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

X_1 = Indeks harapan hidup

X_2 = Indeks pendidikan

X_3 = Indeks standar hidup layak

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno dalam (Hariyono, 2016) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya, investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan bertambah.

Pertumbuhan ekonomi mempunyai dua segi pengertian yang berbeda. Di satu pihak istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Di lain segi istilah tersebut bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan pendapatan nasional riil, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga yang konstan.

pendapatan nasional riil ini berarti barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun



sebelumnya. Jumlah kenaikan yang berlaku, jika dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya, menggambarkan tingkat (prestasi) pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut

$$g_t = \frac{Y_t^r - Y_{t-1}^r}{Y_{t-1}^r} \times 100$$

dimana g_t adalah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t yang dinyatakan dalam persen, Y_t^r adalah pendapatan nasional riil pada tahun t dan Y_{t-1}^r adalah pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Pendapatan nasional yang dimaksudkan dalam formula itu dapat diartikan sebagai Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto. Tetapi yang sebaiknya digunakan adalah Produk Domestik Bruto karena konsep ini menggambarkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi dan kegiatan memproduksi di dalam kawasan suatu negara. Dengan demikian ia menggambarkan kenaikan produksi nasional yang benar-benar berlaku dalam negara tersebut.

2.1.4 Belanja Pendidikan

Muliza dkk, 2017 mengemukakan bahwa belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan

Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



2.1.5 Belanja Kesehatan

Muliza dkk, 2017 mengemukakan bahwa belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (Kuncoro, 2013).

2.1.6 Belanja Infrastruktur

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Pengangguran

Pengaruh belanja pendidikan terhadap pengangguran tidak dapat dilihat langsung. Belanja pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan



Manusia (IPM), oleh karena itu diharapkan dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan akan meningkatkan IPM sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.

Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan kehidupan. Dalam kenyataannya, pendidikan khususnya pendidikan tinggi, yang tidak atau belum mampu menghasilkan lulusan seperti yang diharapkan. Lulusan perguruan tinggi tidak otomatis terserap oleh lapangan kerja, sehingga menimbulkan terjadinya tenaga kerja terdidik (Fadhilah Rahmawati dan Vincent Hadi Wiyono, 2004). Terjadinya gejala ketimpangan antara pertambahan persediaan tenaga kerja dengan struktur kesempatan kerja menurut jenjang pendidikan, menunjukkan terjadinya gejala, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar angka pengangguran potensialnya (Ace Suryadi, 1994).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan



bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran yang selama ini terjadi.

Berkaitan dengan upaya pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis dalam mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan yang lebih tinggi, jumlah tenaga kerja yang terserap akan meningkat sehingga jumlah pengangguran berkurang. Dengan demikian, aktivitas pembangunan dapat tercapai sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang akan lebih baik. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia (Amar, 2017).

Manfaat utama pendidikan adalah risiko yang lebih rendah untuk menjadi pengangguran di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dalam PSID (Panel Study of Income Dynamics) data pada tenaga kerja laki-laki, mengurangi pengangguran yang ditemukan jauh lebih penting daripada mengurangi durasi pengangguran dalam menciptakan perbedaan pendidikan dalam tingkat pengangguran. Karena keterikatan para pekerja dengan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka sangat besar, dengan tingginya tingkat pendidikan maka risiko menjadi pengangguran ketika lepas dari perusahaan tersebut lebih rendah (Mincer, 1991).



2.2.2 Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Pengangguran

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi dan net-ekspor (ekspor dikurangi impor). Kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian dalam rangka mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Intervensi pemerintah yang dikenal dengan kebijakan fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah.

Bentuk hubungan negatif yang terjadi di Indonesia antara peningkatan (anggaran belanja) dengan pengangguran ini sejalan dengan pemikiran ekonom-ekonom aliran Keynesian. Dimana mereka mendasari pemikiran bahwa variabel pemerintah (khususnya anggaran) dianggap sebagai salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan nantinya hal ini diharapkan akan menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect* pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi.

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Todaro & Smith, 2003, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar



untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

2.2.3 Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap Pengangguran

Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Deni Friawan (2008) menjelaskan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya studi The World bank (2004) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia.

Teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh Pandangan Klasik mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith, yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik. Dalam bukunya "*An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*", yang diterbitkan lebih dari dua abad yang lalu, Smith mengemukakan beberapa

an mengenai faktor-faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan

Pandangannya yang utama adalah Peranan sistem pasar bebas.



Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Oleh sebab itu Smith merasa pemerintah tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Fungsi pemerintah perlulah dibatasi kepada menyediakan fasilitas-fasilitas yang menggalakkan perkembangan kegiatan pihak swasta. Menyediakan infrastruktur, mengembangkan pendidikan dan menyediakan pemerintahan yang efisien adalah beberapa langkah yang akan membantu perkembangan pihak swasta.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kesuksesan suatu pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Pengeluaran di bidang infrastruktur dipercaya dapat menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar (Fauji, 2017).

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ikhsan (2004) bahwa secara langsung pembangunan infrastruktur sendiri merupakan kegiatan produksi yang menciptakan output dan kesempatan kerja. Secara tidak langsung, ketersediaan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lain, terutama infrastruktur dasar yang memberikan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan infrastruktur lanjutan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Cliff Laisina, dkk (2015) meneliti tentang "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013"



menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan analisis jalur. Data yang digunakan diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh.

Rizha Firdhania dan Fivien Muslihatinningsih (2017) meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember” dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder berupa data *time series* yang diperoleh dari Disnaker Kabupaten Jember dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2002-2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif statistik dan analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis menggunakan pengujian parsial (uji t), simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Variabel inflasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Secara simultan hasil analisis data menunjukkan jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan indeks

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.



Merang Kahang, dkk (2016) meneliti tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur” dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang telah tersedia untuk instansi pemerintah yang terlibat dalam masa studi 2009-2014. analisis model dalam penelitian tersebut adalah Program regresi linier berganda digunakan untuk mengolah data uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 22. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor pengeluaran pemerintah pendidikan (X1) secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah (X2) tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan sektor pengeluaran kesehatan (X2) belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian dari belanja pemerintah di sektor pendidikan (X1) memiliki efek dominan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Muhammad Nurcholis (2014) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014” dengan tujuan untuk mengetahui distribusi, klasifikasi, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisa data yang sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian adalah menggunakan model analisis regresi data panel serta menggunakan klasifikasi intensitas dan

dasarkan hasil regresi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan upah minimum dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.



Variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif, sedangkan IPM berpengaruh positif. Sedangkan untuk pengujian F hitung, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Darman (2013) meneliti tentang “Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran: Analisis Hukum Okun” menggunakan metode difference version hukum Okun untuk mendapatkan koefisien Okun dan analisis Ordinary Least Square (OLS) untuk mendapatkan koefisien regresi. Dalam kerangka ekonomi makro, hukum Okun menyatakan bahwa apabila GDP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya, yang telah dicapai pada tahun tertentu, tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dapat diketahui bahwa koefisien Okun di tiap-tiap Negara berbeda. Di Indonesia, literature ilmiah yang khusus mengangkat Hukum Okun belum ada, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan Hukum Okun di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Okun berlaku di Indonesia, dimana koefisien Okun bernilai negatif. Tingkat pengangguran cenderung meningkat seiring dengan dicapainya pertumbuhan GDP.

Desi Dwi Bastias (2010) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009” dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969-2009. Pengeluaran pemerintah atas infrastruktur diwakilkan dengan variabel pengeluaran pemerintah

rumahan dan variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi.
eluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada



dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat time lag ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia dan prasarana fisik, hal ini juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan.

Model analisis yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM), dengan model ini diharapkan dapat menjelaskan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang. Model kesalahan mampu meliputi banyak variabel dalam menganalisa fenomena ekonomi jangka panjang serta mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi. Selain itu model ini mampu mencari pemecahan terhadap persoalan variabel time series yang tidak stasioner dalam ekonometri. Hasil regresi dengan model ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan perumahan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang variabel pengeluaran

ah atas perumahan dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan variabel pengeluaran



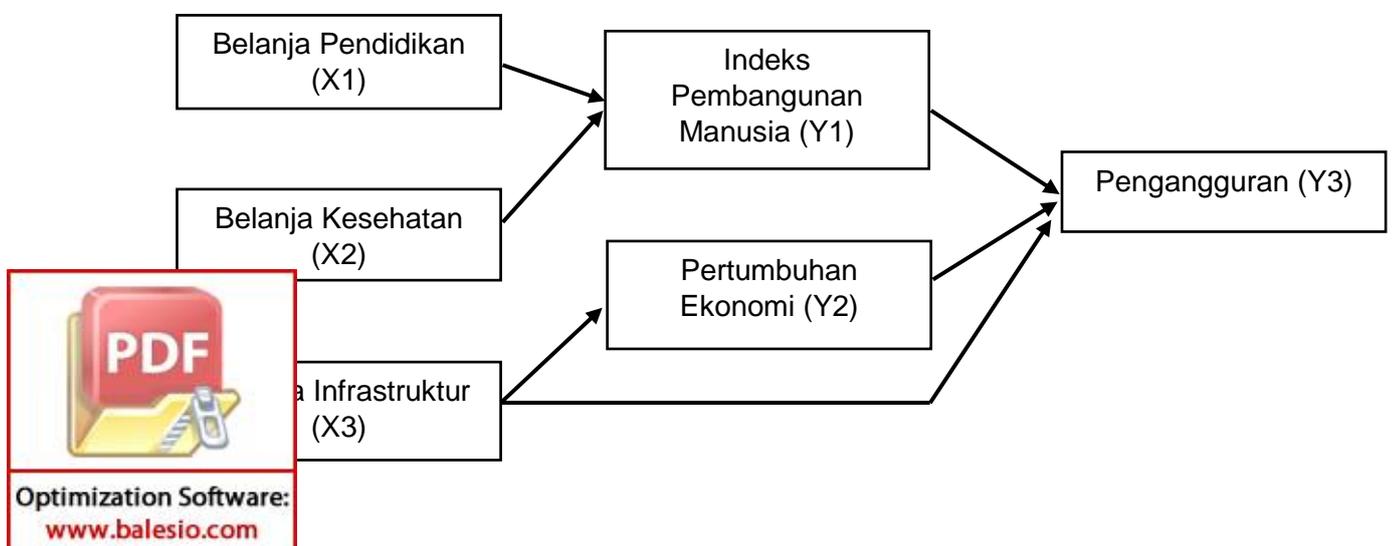
pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Shakirat Adepeju Babatunde (2018) meneliti tentang “Pengeluaran Pemerintah Untuk Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Nigeria” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Dalam studi ini, data sekunder dianalisis dan diuji dengan menetapkan dua variabel: variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi dengan G.D.P. sebagai proxy; variabel independen adalah pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur. Analisis dilakukan dengan bantuan paket analisis statistik EViews untuk Windows 7. Studi ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

2.4 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang skematis disajikan dalam gambar 2.1 di samping.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Dari kerangka pemikiran tersebut dijelaskan bahwa belanja pendidikan dan belanja kesehatan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian Kahang dkk (2015) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh terhadap IPM. Lebih jauh, Bastias (2010) menyimpulkan bahwa belanja infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian yang membahas terkait pengaruh IPM dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran telah dilakukan sebelumnya oleh Nurcholis (2014) yang menemukan pengaruh negatif antara kedua variabel independen terhadap variabel pengangguran.

Dalam teori Okun yang dijelaskan oleh Samuelson (2005) menjelaskan bahwa untuk setiap 2 persen kemerosotan GNP dari GNP potensialnya, tingkat pengangguran melonjak 1 persen. Hal ini menguatkan dugaan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoretis, dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Diduga belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran melalui IPM di Kabupaten Barru.
2. Diduga belanja infrastruktur berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.

